

# MENGAPA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUKAN ILMU PEKERJAAN SOSIAL?

Oleh : Fordolin Hasugian\*

## Abstract

*This article intends to unravel the various issues surrounding the naming or designation for the study of social welfare programs or social work in college. It is associated with government regulations, organizations and organizations of the organizers of the course graduates. By understanding these issues, is expected to arouse the social science community welfare or the science of social work and social workers to agree and propose to the government to make amendments deemed inappropriate.*

*Keywords: social welfare, social work, social worker*

## Abstrak

*Artikel ini bermaksud untuk mengurai berbagai persoalan yang menyelimuti penamaan ataupun sebutan bagi program studi ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial di perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan ketentuan pemerintah, organisasi penyelenggara serta organisasi para lulusan program studi tersebut. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat menggugah komunitas ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial dan para pekerja sosial untuk menyepakati dan mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang dipandang tidak sesuai.*

*Kata kunci: kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, pekerja sosial*

## 1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sekarang ini, ada 36 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Studi/Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta). Dari 36 Program studi tersebut, 31 program studi menginduk pada Universitas atau Institut dan sisanya pada Sekolah Tinggi. Sembilan belas (19) program studi diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk sekolah kedinasan, dan sisanya 17 lagi diselenggarakan oleh swasta. Lima (5) program studi terdapat di pulau Sumatera, 6 di Jakarta, 6 di Jawa Barat, 5 di Jawa Tengah dan Jogjakarta, 6 di Jawa Timur, 2 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, dan 3 lagi di Kupang – NTT, Ambon - Maluku dan Jaya Pura – Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 program studi (lebih setengah) terdapat di Pulau Jawa. Perkembangan jumlah program studi ini cukup menggembirakan, dengan asumsi bahwa masyarakat sudah semakin memahami akan fungsi dan manfaat Pekerjaan Sosial.

Jumlah Program Studi Pekerjaan Sosial (PS) ini terutama meningkat sejak akhir tahun 1990-an

sampai dengan 2000-an, karena sebelumnya jumlahnya paling sekitar 10-an, baik yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pada tahun 1990-an satu-satunya program studi pada jenjang S2 (Pascasarjana), hanya ada di Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Sekarang sudah ada 7 program studi jenjang S2 dan 2 jenjang S3.

Pemetaan Program Studi PS, baik secara geografis maupun lokusnya, sebagaimana digambarkan di atas, dimaksudkan untuk lebih memahami keberadaan dari Program Studi PS itu sendiri, penyelenggaraanya, termasuk “warnanya”. Karena berdasarkan pengalaman bertahun-tahun terlibat dalam penyelenggaraan program studi PS, setiap kali ada pertemuan sesama program studi, misalnya, seminar, lokakarya, dan sebagainya, masih terdapat silang pendapat antara para pengelola program studi antara istilah Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, dan sampai hari ini belum ada kesepakatan untuk itu.

Nama program studi yang digunakan untuk seluruh perguruan tinggi yang ada adalah PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, hal ini sesuai dengan SK Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti Kemdiknas) No. 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi, bahwa untuk jenjang S1 (kode 72-201), S2 (kode 72-101) dan S3 (belum diatur), sedangkan untuk jenjang Diploma (D3) digunakan istilah PEKERJA SOSIAL (kode 72-401). Karena semua program studi yang disebutkan di atas adalah penyelenggara S1, S2 dan S3, dan kebetulan tidak ada yang menyelenggarakan program Diploma, maka istilah yang digunakan adalah Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Semua penyelenggara program studi tersebut tergabung dalam satu wadah sebagai forum komunikasi program studi yang sejenis yakni Ikatan Pendidikan PEKERJAAN SOSIAL Indonesia (IPPSI).

Jika disimak dari peristilahan (penamaan) yang digunakan SK Dirjen di atas, maka antara istilah Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, juga membingungkan. Istilah Ilmu Kesejahteraan dimaksudkan sebagai suatu bidang ilmu tertentu, seperti dikemukakan oleh Edy Suharto (2007), bahwa Kesejahteraan Sosial dapat dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan program-program pelayanan sosial. Jika mengacu kepada pemahaman seperti ini, maka Ilmu Kesejahteraan sebagai suatu program studi, tentu sangat tepat, dan pekerjaan sosial sebagai anak kandung dari Ilmu Kesejahteraan Sosial? Sedangkan istilah pekerja sosial, umum mengetahui, jika disebut pekerja, tentu menyangkut orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu, dan mengacu kepada pemahaman ini, maka pekerja sosial adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam bidang sosial. Kata sosial dalam pekerja sosial menjadi sangat membingungkan dan bermakna ganda, sehingga tidak jelas. Dengan demikian, barangkali istilah pekerja sosial sebagai sebuah program studi, tentu tidak konsisten dengan program studi lainnya yang digunakan dalam SK Dirjen di atas, karena baik untuk jenjang Diploma maupun Sarjana, semua program studi menggambarkan sebuah keterampilan atau keahlian tertentu, bukan menunjuk pada orang. Mengutip Friedlander (1961), bahwa pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan ketrampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara perorangan maupun kelompok untuk mencapai kepuasan dan ketidaktergantungan secara pribadi

dan sosial, maka pekerja sosial dalam hal ini adalah pelaksana dari pekerjaan sosial. Mungkinkah pekerjaan sosial yang dimaksudkan dalam SK Dirjen di atas, bukan sebagai pekerja sosial? Mengapa ada perbedaan antara sebutan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk jenjang program Diploma dan Sarjana?

Selanjutnya, karena Ilmu Kesejahteraan Sosial atau Pekerjaan Sosial, dipandang sebagai ilmu terapan, maka bobot praktikum dalam kurikulumnya cukup tinggi. Sasaran intervensi pekerja sosial adalah manusia, maka dalam proses belajar mengajar, terutama dalam praktikum para dosen selalu menuntut agar mahasiswa benar-benar menjadi seorang yang profesional, dengan memanfaatkan diri mahasiswa itu sendiri sebagai “alat” perubahan. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut menggunakan kepekaan “kemanusiaannya” dalam melaksanakan proses intervensinya. Dengan pembekalan dan proses belajar mengajar seperti itu, maka para lulusan program studi ini merasa mantap dengan predikat profesional. Setelah mereka tamat, maka mereka menyebut diri sebagai **Pekerja Sosial Profesional, bukan Kesejahteraan Sosial Profesional**. Dengan rasa keprofesionalannya itu, maka para alumni membentuk wadah organisasi persekutuan mereka yang disebut Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), untuk membedakan dari pekerja sosial sukarelawan, atau tenaga kesejahteraan sosial (UU No. 11 tahun 2009).

## 2. Perumusan Masalah

Dengan kondisi seperti dijelaskan di atas, maka dapat ditemukan tiga hal kerancuan, yakni: *Pertama*, peristilahan (penamaan) dalam SK Dirjen Dikti untuk jenjang program Diploma (pekerja sosial-pekerjaan sosial?) dan Sarjana (Ilmu Kesejahteraan Sosial). *Kedua*, wadah atau organisasi penyelenggara program studi ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia yang menyebut diri sebagai Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI). *Ketiga*, wadah organisasi alumni program studinya, yakni Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat dibayangkan, jika kebijakan pengaturan penyelenggaraan program studi saja sudah seperti di atas, bagaimana dengan pengaturan dan penyelenggaraan program studi di “lapangan”? Hal-hal inilah yang mengusik penulis untuk mencoba menelusuri permasalahan yang ada, serta melihat realitas program studi pekerjaan

sosial pada perguruan tinggi yang menyelenggarakannya.

Ketika Kongres V IPPSI tahun 2010 di Bandung yang lalu, ada upaya dari beberapa peserta kongres untuk merubah nama organisasi IPPSI menjadi nama lain, karena dalam realitasnya semua peserta datang dan diutus oleh Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dari perguruan tinggi masing-masing. Namun di akhir kongres tidak ada kesepakatan untuk mengubahnya, sehingga tetap menggunakan nama IPPSI. Situasi ini merupakan sesuatu yang aneh juga, dan memunculkan beragam pertanyaan. Apakah peserta kongres merasa secara substansi keilmuannya lebih tepat menggunakan Ilmu Pekerjaan Sosial daripada Ilmu Kesejahteraan Sosial? Apakah SK Dirjen Dikti yang tidak tepat merumuskannya? Dimana sesungguhnya sumber masalahnya? Padahal ketika Kongres diadakan, diundang dan datang juga utusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, namun tidak ada klarifikasi mengenai hal ini.

### 3. Pembahasan

Dengan situasi seperti dijelaskan di atas, maka semakin jelas di depan mata bahwa Program Studi Ilmu Pekerjaan Sosial atau Ilmu Kesejahteraan Sosial mempunyai beragam “warna”. Keberagaman “warna” tentu sangat alamiah dan wajar, namun permasalahannya adalah jika secara substansi keilmuan juga sudah ber”warna-warni”, apa jadinya Ilmu Pekerjaan Sosial atau Ilmu Kesejahteraan Sosial ini? Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan pemahaman bahwa jika program studi menggunakan istilah Ilmu kesejahteraan sosial, maka arah pengembangan kurikulum program studinya adalah pada Kebijakan Sosial atau pembangunan sosial, dan bersifat makro, dengan demikian merupakan pelayanan tidak langsung (*indirect services*). Sedangkan jika Pekerjaan Sosial, dipandang lebih bersifat mikro dan klinis (*direct services*). Meskipun pemahaman seperti ini sesungguhnya tidak terlalu tepat, apalagi mengacu pada definisi Pekerjaan Sosial sebagaimana dikemukakan oleh Zastrow (1982) bahwa *Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals*. Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan

menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya. Zastrow ingin menunjukkan bahwa sasaran bantuan pekerjaan sosial mulai dari individu sampai pada masyarakat. Dalam memperbaiki masyarakat, bisa dimulai dari individu, kemudian kelompok atau organisasi lalu masyarakat, dan sebaliknya memperbaiki individu bisa juga dimulai dari masyarakat. Karena diantara semua sistem-sistem itu saling keterkaitan, ketergantungan dan pengaruh mempengaruhi satu dengan lainnya. Itu berarti seorang pekerja sosial harus memahami strategi bantuan sosial, baik secara mikro, meso dan makro, pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Hal senada juga dikemukakan oleh *IFSW (International Federation of Social Workers)* dan *NASW (National Association of Social Workers)* (2000), bahwa *The Social Work Profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social intervenes at the points where people interact with their environment. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work* (<http://digilib.bc.edu/reserves/sw826/hare826.pdf>). Profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Penggunaan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial pada titik dimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial. Definisi ini semakin mempertegas bahwa Pekerjaan Sosial bukanlah hanya mikro saja, meso atau makro saja, tetapi ketiganya sekaligus. Pekerjaan sosial bisa mengupayakan perubahan sosial pada skala yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama bisa juga melakukan terapi pada tingkat individu ataupun kelompok. Jika dikaitkan dengan metode pekerjaan sosial, seperti *Casework*, *Group Work* atau *Community Organization/Community Development (CO/CD)*, sesungguhnya tidak ada metode yang lebih baik, sebab metode yang tepat adalah yang sesuai dengan permasalahan atau kasus yang ada dan situasi yang tepat. Penetapan metode hanya bisa dilakukan setelah permasalahan pokok diketahui secara pasti, jadi bukan menetapkan metode terlebih dahulu,

sebelum permasalahannya diketahui secara pasti. Karena bisa saja masalah individu penyebabnya justru ada pada keluarga atau masyarakat, dan sebaliknya.

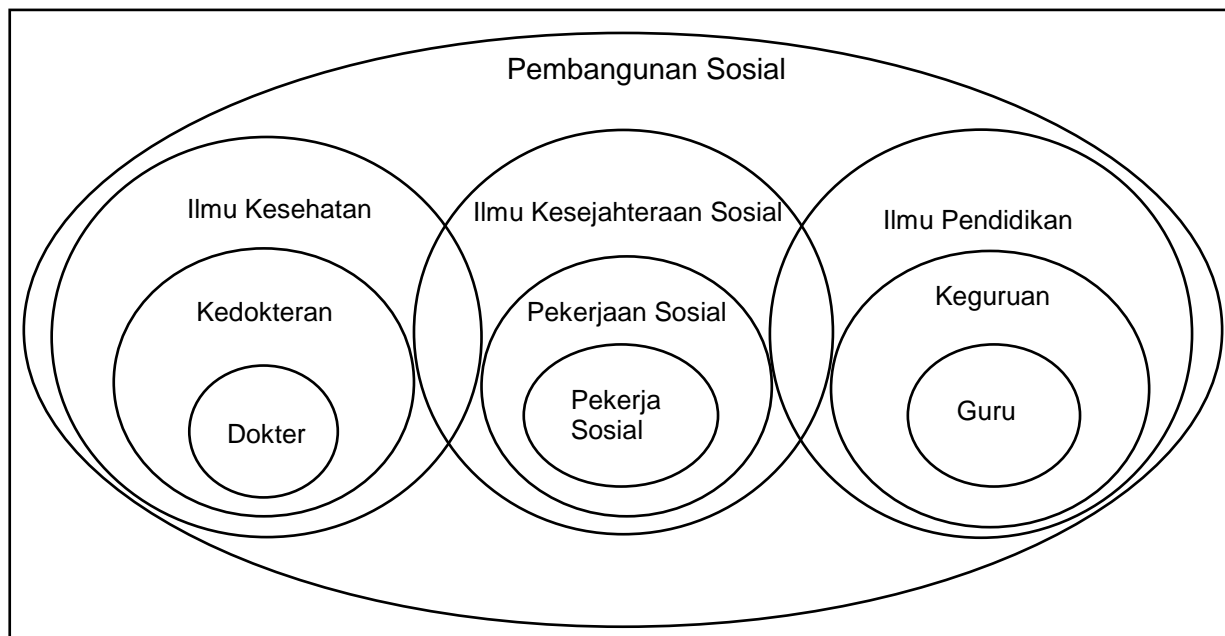
Dengan pemahaman seperti ini, maka tidak layak untuk mengatakan pekerjaan sosial hanya ada pada tataran mikro saja, karena hal itu hanya membatasi ruang gerak pekerja sosial dalam melakukan intervensi terhadap kliennya, dan bahkan menjauhi permasalahan sosial yang sesungguhnya.

Kembali kepada permasalahan tentang penamaan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Pekerjaan Sosial. Sebelum membahas Kesejahteraan Sosial sebagai ilmu, maka ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu tentang kesejahteraan sosial itu sendiri, karena pengertiannya bisa dipahami dalam berbagai sudut pandang. Menurut Edy Suharto (2007), kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisir dalam bidang pembangunan sosial. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial biasanya merujuk pada arena atau *field of practice* tempat berkuprah berbagai profesi kemanusiaan, termasuk pekerja sosial, dokter, perawat, guru, psikolog, dan psikiater. Di negara-negara maju, kesejahteraan sosial sangat identik dengan jaminan sosial (*social security*), seperti *public assistance* dan *social insurance*, atau sering juga disebut sebagai provisi sosial, yang diselenggarakan negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Max Siporin (1975), Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai perhatian utama dan langsung meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup provisi-provisi dan proses yang secara langsung yang mencakup penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan

perbaikan kualitas hidup. Sedangkan menurut Zastrow (2000), Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kesejahteraan dapat dipahami sebagai sebuah tujuan, program, kebijakan, pelayanan sosial ataupun jaminan sosial untuk warga masyarakat, khususnya masyarakat kurang beruntung. Semua kebijakan, pelayanan ataupun program tersebut, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta atau masyarakat. Memang dari definisi-definisi tersebut di atas, belum secara eksplisit menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial sebagai Ilmu. Namun menurut Edy Suharto (2007), sebagaimana dikutip di atas, bahwa Kesejahteraan Sosial dapat dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan program-program pelayanan sosial. Alasannya adalah karena belakangan ini, bidang studi kesejahteraan sosial telah sangat aktif menyelenggarakan berbagai proyek penelitian dan pengembangan keilmuannya yang semakin spesifik. Kesejahteraan sosial lebih komprehensif daripada pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial mencakup pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial berhubungan erat pada tingkat praktik. Sebagai bagian dari ilmu sosial terapan, kesejahteraan sosial sering sulit dibedakan dengan sosiologi, psikologi, sosiatri (dikembangkan di Universitas Gadjah Mada), dan khususnya dengan pekerjaan sosial (*social work*). Mengutip Suharto, berikut analogi Ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu lainnya yang berperan dalam pembangunan sosial.





**Gambar: Analogi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pendidikan**

Gambar di atas menjelaskan analogi 3 contoh disiplin ilmu yang berperan dalam pembangunan sosial. Kedokteran bagian dari ilmu kesehatan dan pelakunya adalah dokter; Keguruan bagian dari ilmu pendidikan dan pelakunya adalah guru; dan pekerjaan sosial bagian dari ilmu kesejahteraan sosial dan pelakunya adalah pekerja sosial. Dengan analogi ini, apakah kedokteran, keguruan dan pekerjaan sosial tidak disebut sebagai ilmu? Hal ini patut menjadi pertanyaan, betapa tidak, karena dalam kedokteran masih ada spesialisasi ilmu yang sangat bermacam-macam, demikian juga dengan keguruan. Bagaimana dengan pekerjaan sosial? Yang pasti bahwa dari berbagai literatur yang ada, pekerjaan sosial disebut sebagai sebuah ilmu dan profesi, seperti dikutip di atas bahwa pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya, profesi untuk mengupayakan perubahan.

Kemudian dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_work](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_work), dikatakan bahwa *social work is a professional and academic discipline that seeks to improve the quality of life and wellbeing of an individual, group, or community by intervening through research, policy, community organizing, direct practice, and teaching on behalf of those afflicted with poverty or any real or perceived social injustices and violations of their human rights.* Pekerjaan Sosial adalah suatu disiplin profesional

dan akademik yang mencoba memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan individu, kelompok atau komunitas dengan berintervensi melalui penelitian, kebijakan, pengorganisasian masyarakat, praktik langsung dan mengajar atas nama orang-orang yang menderita dengan kemiskinan atau orang-orang yang merasakan ketidakadilan sosial, kekerasan atas hak-hak asasi mereka. Dengan pernyataan ini, sudah sangat jelas dan tegas bahwa pekerjaan sebagai sebuah disiplin ilmu dan profesi tersendiri. Bahkan Suharto sendiri mengatakan bahwa jika ada kalangan Perguruan Tinggi (program studi) yang mencoba mengembangkan ilmu kesejahteraan sosial, namun sama sekali tidak mengkaitkannya dengan, dan bahkan alergi terhadap, disiplin pekerjaan sosial, selain *a-historis* juga bisa disebut sebagai “orang yang kebingungan”.

Di semua universitas Australia dan Selandia Baru, penyelenggaraan pendidikan kesejahteraan sosial, dilakukan di bawah *school* atau *department of social work*. Sebagian besar universitas di Amerika Serikat juga menyelenggarakan pendidikan kesejahteraan sosial di bawah *School of Social Work*. Namun, beberapa universitas di AS, seperti *State University of New York at Albany* dan *University of Kansas*, menyelenggarakan pendidikan kesejahteraan sosial di bawah *School of Social Welfare*. Sedangkan di *University of California at Los Angeles (UCLA)*, ilmu kesejahteraan sosial diajarkan di *Department of Social Welfare* yang berada di bawah *School of Public Affairs*. Di semua universitas AS, meskipun namanya *School*

of *Social Welfare*, fokus studi dan kurikulumnya tetap mengacu pada bidang ilmu pekerjaan sosial.

Dengan penjelasan ini, maka posisi pekerjaan sosial sebagai ilmu dan profesi sudah tegas. Jika analog dengan ilmu kesehatan di atas, maka ilmu dan profesi kedokteran mempunyai tempat tersendiri, sebab selain itu masih ada ilmu kesehatan masyarakat, psikiatri, kebidanan, keperawatan dan lainnya. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada pekerjaan sosial, tegas saja menyebut nama Ilmu Pekerjaan Sosial, sebab ke depan pasti akan muncul ilmu-ilmu lain yang tergabung dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dalam pekerjaan sosial sendiri kita mengenal adanya pekerja sosial medis, industri, koreksi, dan sebagainya. Memang di Indonesia belum terlalu berkembang spesialisasinya, tetapi untuk masa mendatang, tentu hal ini menjadi peluang tersendiri.

Pemikiran seperti ini, ditegaskan kembali oleh Dorita Setiawan (2009), dengan mengatakan: *Jadi ketika membicarakan pendidikan pekerjaan sosial, kita harus dapat menjawab pertanyaan penting, sebagai pekerja sosial hal apa yang harus kita ketahui? Dan apa yang diharapkan dari seorang pekerja sosial?* Tentu saja hal ini banyak mengundang perdebatan antara mereka yang terlibat di lapangan layanan sosial, para pendidik pekerjaan sosial, pembuat kebijakan, akademisi dan semua orang yang merasa terlibat. Perbedaan antara apa dan bagaimana menamakan pekerjaan sosial sebagai sebuah disiplin adalah dinamika awal terbentuknya pekerjaan sosial di Amerika. Di Indonesia, hal ini sedang berlangsung, kita semua sedang mencari bentuk dan formula membentuk sebuah pekerjaan sosial yang dianggap ideal.

Namun, tentunya kita harus dapat bergerak cepat dan tidak berputar-putar dalam pembentukan sebuah nama, namun mencari titik persamaan akan bagian apa yang dapat kita lakukan. Dengan berjalannya waktu, ketika tuntutan profesi pekerjaan sosial kian menuntut keahlian yang spesifik, jelas dan berkelanjutan, profesi pekerjaan sosial di Indonesia dituntut memiliki tingkat akademik yang cukup hingga dapat menghasilkan tenaga profesional dengan kemampuan spesifik dan berkualitas sehingga dapat berkompetisi dengan profesi yang lainnya.

Ketika hal ini tidak dilakukan, lahan pekerjaan sosial menjadi lahan yang dapat diserbu siapa saja. Yang dimaksud lahan disini adalah ranah pekerjaan dimana dibutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan itu hanya bisa dilakukan oleh

pekerja sosial. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan berarti kita dapat melabel satu produk yang bukan milik kita. Di Aceh paska tsunami misalnya, banyak orang melihat pekerja sosial profesional melakukan pekerjaan yang sangat berbeda dibanding dengan mereka yang tidak profesional, "produk" yang dimiliki oleh pekerja sosial profesional adalah produk dengan rangkaian sistematis, terarah dan terukur.

#### 4. Kesimpulan

Tulisan ini, mungkin terlalu sederhana untuk bisa menggugah banyak orang, apalagi untuk dapat merubah kebijakan yang kurang tepat, namun berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masih ada silang pendapat untuk penamaan program studi ilmu kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, hal ini dapat berpengaruh kepada upaya pengembangan program studi itu sendiri.
- b. Dengan belum adanya kesepakatan tentang perubahan wadah organisasi pengelola program studi dari IPPSI menjadi Ikatan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Indonesia (IPKSI) misalnya, meskipun semua program studi yang ada menamakan diri ilmu kesejahteraan sosial, tentu hal ini menjadi peluang tersendiri untuk lebih menegaskan keberadaan pekerjaan sosial sebagai sebuah ilmu dan profesi, tanpa mengabaikan bahwa mungkin kesejahteraan sosial juga sebagai sebuah ilmu tersendiri. Pernyataan ini juga menjadi penting, mengingat bahwa organisasi para lulusan program studi ilmu kesejahteraan sosial juga masih tetap menggunakan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI).
- c. Untuk itu, masyarakat atau komunitas ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial dan para pekerja sosial di Indonesia perlu membuat kesepakatan untuk mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, agar dapat merubah ketentuan yang sudah ada tentang kodifikasi ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Sehingga tidak membingungkan masyarakat, khususnya para penyelenggara pendidikan, dosen, mahasiswa, alumni dan instansi terkait.
- d. Keseragaman menjadi penting bagi pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia, karena kalau tidak, pekerjaan sosial sangat mustahil untuk diterima sebagai profesi, karena setiap lulusan tidak memiliki titik persamaan sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

Friedlander, Walter A. (1961). *Introduction to Social Welfare*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.

[Setiawan](#), Dorita (2009). *Mengembangkan Profesi Pekerja Sosial Indonesia: Isu Pendidikan Profesi*, <http://Social Worker.or.id>

Siporin, Max (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York : McMillan Publishing, Co. Inc.

Suharto, Edi (2007). *Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Makalah Seminar.

Zastrow, Charless (1982). *Introduction to Social Welfare Institutions: Social Problems, Service, and Current Issues*,

Zastrow, Charles H. (2000). *Introduction to Social Work and Social Welfare*, Pacific Grove: Brooks/Cole.

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

SK Dirjen Dikti Kemendiknas, No. 163/DIKTI/KEP/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

<http://digilib.bc.edu/reserves/sw826/hare826.pdf>).

[http://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_work](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_work)

\* **Dr (Can) Fordolin Hasugian, M.Si.**

Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial STISIP Widuri dan Sekretaris Program Pascasarjana STISIP Widuri Jakarta

email : [fordihas@yahoo.com](mailto:fordihas@yahoo.com)

“When we  
dream alone it’s  
only a dream,  
but when we  
dream together  
it’s dawn of  
reality”.

(Friedensreich  
Hundertwasser)